

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI. I KESIMPULAN**

Era revolusi industri 4.0 mengharuskan bagi seluruh masyarakat bahkan aktor dunia untuk melakukan percepatan teknologi, tentunya hal tersebut merupakan hal baru yang perlu dilakukan melalui beberapa tahapan. Percepatan teknologi sangat berdampak pada berbagai macam sektor seperti, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dll. Terutama saat ini dunia sedang terpukul karena wabah covid-19 yang tak kunjung usai. Korea Selatan muncul sebagai negara yang dapat menekan jumlah kematian dan kasus terinfeksi pada skala besar. Pengalaman Korea Selatan pada kasus MERS 2015 menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih mengedepankan transparansi maupun pemberitahuan informatif bagi warganya serta lebih memperhatikan sektor lainnya yang terdampak. Maka dari itu di masa covid-19 seperti ini, pemerintah Korea Selatan merangkul segala partisipasi publik untuk menghadapi tantangan yang ada untuk terus mempertahankan sektor yang melemah seperti perekonomian negara. Hal tersebut tidak semata-mata hanya usaha pemerintah dalam mengupayakan tantangan baru menghadapi covid-19, namun juga partisipasi kolektif serta kesadaran publik untuk bergerak bersama mengatasi permasalahan yang ada.

Sikap cinta produk tanah air dan jiwa kompetitif sudah ditanamkan setelah era kolonialisme demi menunjang keberlangsungan hidup negaranya dengan tidak bergantung pada bantuan yang datang serta terus melakukan inovasi dengan bergerak cepat. Dalam pemanfaatan transformasi digital, Korea Selatan terbilang unggul dan selangkah lebih maju dalam pemanfaatan IPTEK, hal ini dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber daya negara. Contohnya dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, banyak merek dagang korea yang menjamur baik secara lokal maupun

internasional, merek dagang tersebut ialah alat kebutuhan rumah tangga, kendaraan, alat elektronik, alat berat, aplikasi ponsel, dll.

Dengan modal kemajuan IPTEK di Korea Selatan dan juga fenomena covid-19, menjadikan pemerintah ber-inovasi dalam kegiatan diplomatik khususnya dalam pemanfaatan media digital sebagai bentuk komunikasi. Media digital mengambil peran penting dalam kegiatan diplomatik terutama sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pandemi yang membatasi mobilitas dan aktifitas manusia. Jauh sebelum datangnya pandemi Korea Selatan telah mengupayakan dalam kemajuan teknologinya dengan memberikan investasi secara besar pada sektor digital terutama juga pada bidang *Big data* dan *Artificial Intelligence* yang mana sangat berperan dalam pengelolaan dan pemrosesan segala aktifitas publik dengan media digital.

Dalam aktivitas diplomasi digital, pemerintah Korea Selatan memperhatikan pula mengenai agenda keamanan siber yang terdiri dari tiga sektor yakni sektor publik, swasta, dan militer. Agenda keamanan siber mengacu pada Keamanan Internet, Perlindungan data personal, Promosi dan Informasi keamanan. Disamping itu Kementerian dalam negeri dan keamanan Korea Selatan (MOIS) juga memegang kendali atas diplomasi digital dengan adanya layanan administrasi negara dengan sistem digital seperti *On-nara*, *Gov24*, *HomeTax*, dan *MyData*. Sedangkan untuk portal partisipasi publik sudah tersedia seperti *E-Pepole* dan *Petition to the president* yang ditujukan sebagai media dalam mengungkapkan aspirasi publik serta partisipasi publik terhadap kinerja pemerintahan.

Diplomasi digital yang dilakukan Korea Selatan selama pandemi covid-19 yakni keikutsertaan dalam forum komunikasi Internasional, Regional, maupun Bilateral seperti *International Conference on Digital Diplomacy*, *KTT Seoul P4G Green Growth Summit*, *Korea-Indonesia Digital Government Cooperation Forum*. Selain itu pemanfaatan sosial media digunakan sebagai alat dalam menunjang kegiatan diplomatik yang

membantu meningkatkan sektor sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata. Kementerian luar negeri Korea dalam kegiatan diplomasi digital mengupayakan dengan meluncurkan akun Instagram resmi 'KaoreaZ' yang digunakan untuk berkomunikasi secara luas dengan menghadirkan konten yang menyangkut kebudayaan Korea.

Sedangkan upaya diplomasi yang dilakukan Korea terhadap Indonesia sendiri terdiri dari beragam upaya dalam promosi budaya melalui Internet, yakni (1) Penggunaan sosial media Instagram sebagai wadah untuk mendukung promosi bersama KTO Indonesia dan KCC Indonesia dengan beragam konten. (2) E-commerce sebagai produk pemasaran Korea-Indonesia : Tokopedia, Shopee, Lazada, Produk lokal, dll. (3) Menggandeng influencer lokal dalam konten promosi pariwisata seperti Korea Reomit, Kimbab Family, Bianca Kartika, dan sebagainya. Melalui budaya yang merupakan tahapan awal dalam memperkenalkan suatu ciri khas negara atau segala citra yang ingin ditampilkan oleh negara. Budaya terdiri dari beragam komponen yang mendukung, seperti aktifitas sosial, mobilitas dan keseharian warga, kesenian, cerita sejarah , bangunan yang menjadai ikon negara, bahkan ragam kuliner yang menggugah selera.

## VI.II SARAN

Melalui upaya komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Korea Selatan, sudah terlihat peningkatan bagi Indonesia dalam mengelola Internet serta sosial media sebagai media dalam proses diplomatik. Terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia terhadap diplomasi digital terutama dalam era pandemi. Yang pertama adalah dalam permasalahan covid-19 , dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung lamban dalam memproses perubahan dan selalu berpegang teguh pada aturan sosial yang lampau. Maka dari itu pemerintah Indonesia sebaiknya mengupayakan perubahan tersebut dengan penyuluhan penyuluhan yang informatif terutama bagi kaum yang buta akan internet. Lalu yang kedua adalah perlu adanya peningkatan fasilitas umum terutama infrastruktur yang dapat meunjang mobilitas warga dalam mencapai segala kemudahan fasilitas untuk mempercepat mobilitas warga. Namun perlu diperhatikan jika tidak semua masyarakat terbuka dengan internet, masih terdapat keterbatasan masyarakat terhadap ketersediaan internet tersebut seperti faktor lokasi, usia, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kelengkapan fasilitas internet terutama pada ruang publik serta kesadaran publik juga untuk pemanfaatan internet.

Disamping itu semua, hal terpenting yaitu perlu dilakukan baik pada Korea Selatan maupun Indonesia yaitu dengan adanya satu institusi yang berdiri sendiri untuk menangani diplomasi digital. Sehingga pemegang kendali kebijakan dapat tersusun dengan jelas. Digitalisasi pada saat ini sangat terasa keberadaannya dan tidak dapat dipisahkan dari mobilitas masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan pembentukan institusi terkait dalam urusan digitalisasi contohnya perlu adanya kementerian digital atau sebagainya untuk menutup celah yang kosong atau kurang terpenuhi dalam era digitalisasi ini.